

**JURNAL IMPLIKASI KREDIT PERTANIAN TERHADAP PENDAPATAN  
PETANI  
(STUDI KASUS: PROGRAM KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN  
ENERGI PADA PETANI TEBU DI KABUPATEN MALANG)**

**JURNAL ILMIAH**

**Disusun Oleh:**

**Imanina Eka D**

**0910210058**



**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG**

**2013**

## LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**IMPLIKASI KREDIT PERTANIAN TERHADAP PENDAPATAN PETANI  
(STUDI KASUS: PROGRAM KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN  
ENERGI PADA PETANI TEBU DI KABUPATEN MALANG)**

Yang disusun oleh :

Nama : Imanina Eka Dalilah  
NIM : 0910210058  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 15 Juli 2013

Malang, 15 Juli 2013

Dosen Pembimbing,

**Prof. Ahmad Erani Yustika, SE., M.Sc., Ph.D.**

NIP. 19600615 198701 1 001

**Implikasi Kredit Pertanian Terhadap Pendapatan Petani  
(Studi Kasus: Program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Pada Petani Tebu di Kabupaten  
Malang)**

**Imanina Eka D**

Universitas Brawijaya Malang

Imanina.eka@gmail.com

***Abstrak***

*Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Objek penelitian ini adalah petani tebu di Kabupaten Malang dengan judul penelitian “Implikasi Kredit pertanian Terhadap Pendapatan Petani Tebu di Kabupaten Malang (Studi Kasus: Program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Pada Petani Tebu di Kabupaten Malang)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kemitraan pertanian tebu dalam menunjang tata niaga petani tebu untuk menyejahterakan petani tebu di Kabupaten Malang, dan untuk mengetahui implikasi kredit pertanian dalam program KKPE terhadap kesejahteraan petani tebu di Kabupaten Malang. Analisis yang digunakan untuk mengukur pendapatan petani tebu di Kabupaten Malang menggunakan analisis pendapatan usahatani dan imbalan dan penerimaan biaya (R/C ratio) untuk mengukur efisiensi dan kelayakan usahatani. Hasil analisis pendapatan usahatani tebu tersebut menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh petani tebu non-mitra lebih besar dari keuntungan yang diperoleh petani tebu mitra. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kemitraan belum memberikan peran yang signifikan dalam menunjang tata niaga petani tebu, sehingga kemitraan tersebut juga belum dapat memberikan kesejahteraan bagi petani tebu di Kabupaten Malang. Selain itu, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan juga bahwa kredit pertanian dalam program KKPE belum memberikan implikasi yang signifikan terhadap pendapatan petani tebu di Kabupaten Malang.*

*Kata Kunci: Impilasi Kredit Pertanian Terhadap Pendapatan Petani, Program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Pada Petani Tebu*

**A. PENDAHULUAN**

Pembangunan pertanian memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis pertanian tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata pada penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi; penyerap tenaga kerja; sumber devisa negara; sumber pendapatan; serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan. Berbagai peran strategis pertanian yang dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan perekonomian nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, serta memelihara keseimbangan sumberdaya alam dan lingkungan hidup (Kementrian Pertanian, 2009).

BPS (Badan Pusat Statistik) Indonesia menyebutkan bahwa terdapat tiga sektor utama yaitu sektor industri pengolahan, sektor pertanian, dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran mempunyai peranan sebesar 52,3% tahun 2012. Sektor industri pengolahan memberi kontribusi sebesar 24,0%.

Kemudian sektor pertanian dan perdagangan, hotel, dan restoran mempunyai peranan masing-masing sebesar 14,4% dan 13,9%.

Selanjutnya, mengingat begitu potensialnya pertanian di Indonesia, maka tak heran jika secara otomatis di negara agraris ini pertanian memegang peranan besar dalam menyerap tenaga kerja. Data Biro Pusat Statistik (BPS) Indonesia menunjukkan bahwa sampai Februari 2013, jumlah tenaga kerja Indonesia di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan adalah 39,9 juta dari total angkatan kerja sebanyak 114,0 juta, sedangkan sisanya terdistribusi dalam delapan bidang pekerjaan lain.

Tebu merupakan salah satu sub sektor bidang pertanian yang hanya dapat hidup di daerah tropis. Secara historis, industri gula merupakan salah satu industri perkebunan tertua dan terpenting yang ada di Indonesia. Tebu merupakan salah satu tanaman perkebunan yang turut berperan dalam pembangunan ekonomi nasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar pada sektor perkebunan. Hal ini dikarenakan gula sebagai salah satu dari kebutuhan pokok dan sumber kalori bagi masyarakat Indonesia. Di samping itu, komoditas ini juga mampu menyerap tenaga kerja sekitar 1,3 juta orang dan sumber pendapatan bagi 900 ribu keluarga petani (Dewan Gula Indonesia, 2006; Lestari, 2008).

Sejarah menunjukkan bahwa Indonesia pernah mengalami era kejayaan industri gula pada tahun 1930-an dimana jumlah pabrik gula yang beroperasi adalah 179 pabrik gula, produktivitas sekitar 14,8% dan rendemen mencapai 11,0-13,8%. Dengan produksi puncak mencapai 3 juta ton, dan ekspor gula pernah mencapai sekitar 2,4 juta ton (Sudana, dkk, 2000). Namun sayangnya kondisi tersebut hanya tinggal sejarah. Kini produksi tebu di Indonesia kian lama kian merosot. Selain itu, bahwa produktivitas tebu pada perkebunan rakyat yang pangsa produksinya sekitar 68% hanya sekitar 4-5 ton gula/ha, jauh di bawah produktivitas beberapa negara seperti Australia yang mencapai 97 ton tebu/ha dengan rata-rata rendemen 13,72% atau setara dengan 13 ton gula/ha (Susila, 2002). Rendahnya produktivitas tersebut disebabkan oleh ketidaksesuaian lahan, teknik budidaya yang belum optimal, kesulitan kredit/modal, bias kebijakan pemerintah, dan instabilitas harga. Harga yang rendah menyebabkan petani tidak optimal dalam menerapkan teknis budidaya, khususnya yang memerlukan uang kas, maka akan berdampak negatif terhadap produktivitas (Mudiyatmo, 2000; Woeryanto, 2000; Adisasmito, 1998).

Tak hanya itu, permasalahan tata niaga yang terjadi dalam sektor ini juga pada akhirnya sulit mendukung upaya peningkatan produktivitas. Sistem yang berlaku sekarang yakni 65% dari total produksi adalah gula bagian petani dan 35% adalah bagian PG sebagai upah pengolahan masih menimbulkan perdebatan. Bagi petani, bagian mereka seharusnya bisa lebih tinggi bila proses pengolahan di PG berjalan efisien dan kapasitas giling cukup memadai (Husodo, 2000).

Secara umum, terdapat dua tipe perusahaan tanaman tebu. Pertama yakni pabrik gula (PG) swasta. Pada pabrik gula swasta ini kebun tebu dikelola dengan menggunakan manajemen perusahaan perkebunan (*estate*) dimana PG sekaligus memiliki lahan HGU (Hak Guna Usaha) untuk pertanaman tebunya, seperti Indo Lampung dan Gula Putih Mataram. Kemudian yang kedua adalah PG milik BUMN, terutama yang berlokasi di Jawa, sebagian besar tanaman tebu dikelola oleh rakyat. Dengan demikian, PG di Jawa umumnya melakukan hubungan kemitraan dengan petani tebu. Secara umum, PG lebih berkonsentrasi pada pengolahan, sedangkan petani sebagai pemasok bahan baku tebu. Keduanya bermitra, petani sebagai pemasok bahan baku tebu dan PG mengolah tebu menjadi gula dalam suatu sistem bagi hasil. Dalam hubungan kemitraan itu, kegiatan produksi gula sesungguhnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu petani menghasilkan gula dalam bentuk sukrosa yang tersimpan dalam batang tebu dan mentransformasikan ke dalam bentuk kristal. Hubungan produksi yang demikian itu mengandung potensi konflik kepentingan, terutama pada saat pengaturan pembagian hasil (Mardianto, dkk, 2005).

Melihat betapa pentingnya kredit bagi petani, maka tak heran jika kemitraan menjadi alternatif pilihan bagi petani gula karena kepemilikan lahan per individu atau per perusahaan relatif

sempit untuk lebih mudah memperoleh modal. Secara umum, petani tebu di Jawa didominasi oleh 70% petani kecil dengan luas areal kurang dari 1 ha. Proporsi petani dengan areal antara 1-5 ha diestimasi sekitar 20%, sedangkan yang memiliki areal di atas 5 ha, bahkan sampai puluhan ha diperkirakan sekitar 10% (Deptan, 2007). Selanjutnya, dorongan pemerintah serta adanya hubungan saling membutuhkan antara pelaku usahatani tebu serta subsistem hilir yaitu pabrik gula juga menjadi alasan bagi keduanya untuk memilih melakukan hubungan kemitraan. Petani membutuhkan pinjaman modal, bantuan teknis budidaya, peralatan dan mesin-mesin pertanian, dan pembeli tebu. PG membutuhkan kontinuitas pasokan bahan baku tebu dari petani serta berkepentingan untuk membina petani dan memberi bantuan teknis budidaya agar bahan baku tebu memenuhi standar kualitas tertentu (Najmudinrohman, 2010).

Beberapa program kredit untuk pertanian, termasuk untuk tebu telah beberapa kali dikeluarkan oleh pemerintah seiring juga dengan pergantian nama program yang mewarnainya. Program kredit yang disalurkan oleh pemerintah bagi sektor pertanian, termasuk bagi petani tebu ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada KKPE sendiri, program kredit ini berhasil disalurkan oleh Bank Umum maupun Bank Pembangunan Daerah hingga Juni 2009 sebesar Rp 7.840.961 juta (96,29%) dari plafon Rp 8.143.400 juta. Realisasi penyerapan kredit terbesar adalah untuk budidaya tebu, yaitu Rp 5,99 triliun (73,55%), diikuti dengan pengembangan ternak (13,47%), pengembangan padi jagung, jagung dan kedelai (6,90%), pengadaan pangan (1,64%), pengembangan ubi kayu, ubi jalar, koro (0,69%), serta holtikultura dan jahe (0,04%) (Sayaka, dkk 2010). Dalam hal ini, kredit untuk sektor tebu memiliki realisasi yang paling besar karena perbankan yang bersedia menyalurkan kredit tersebut dijamin oleh Pabrik Gula (PG) yang mengolah tebu dan menjual gula hasil panen petani. Melalui cara inilah perbankan mendapat jaminan dari PG dan petani membayar kredit dengan pemotongan hasil jual gula (Sayaka dkk, 2010).

Meskipun realisasi untuk sub sektor tebu tersebut tergolong yang paling besar, namun ternyata persoalan kemitraan yang terjadi antara petani dan PG sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit dan bagi hasil tersebut juga masih kerap mewarnai hari-hari petani tebu. Berdasarkan matriks realisasi perjanjian kemitraan yang dilakukan, pelaksanaan kemitraan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan isi perjanjian kemitraan sendiri. Hal ini terlihat bahwa dalam penyerahan tebu milik petani belum sepenuhnya digilingkan pada PG yang memberikan pinjaman kredit. Sedangkan pihak PG pun tidak dapat memberikan transparansi rendemen yang diberikan kepada petani sehingga banyak petani yang melanggar etika kemitraan dengan menggilingkan tebunya pada PG lain yang memberikan tingkat rendemen yang lebih tinggi. Selain itu, PG juga tidak memiliki kemampuan untuk menjual agunan milik petani. Hal ini disadari oleh PG sebagai suatu kelemahan sehingga bagi petani yang tidak dapat melunasi pinjamannya, maka agunan tersebut hanya disimpan oleh PG. Perjanjian kemitraan yang dilakukan pun lemah dari sisi hukum. Hal ini mengakibatkan masing-masing pihak kemitraan masih dapat berkehendak sesuai dengan kepentingan masing-masing (Rochmatika, 2006).

Kabupaten Malang sendiri merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang mengandalkan sektor pertanian. Mayoritas penduduk di Kabupaten Malang juga bekerja di sektor pertanian. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015, menunjukkan bahwa mata pencaharian penduduk hampir 40% didominasi sektor pertanian, 18% di sektor industri, 11% di sektor jasa dan sisanya 32% di sektor yang lain. Berbagai potensi pertanian di Kabupaten Malang itu juga termasuk pada produksi tebunya. Pada 2009, Kabupaten Malang menghasilkan tebu sebanyak 2.956.335 ton. Selanjutnya pada tahun 2010, produksi tebu Kabupaten Malang meningkat menjadi 3.441.727 ton, namun tahun 2011 produksi tebu justru mengalami penurunan menjadi 3.353.783 ton. Kabupaten Malang merupakan daerah yang menjadi andalan Jawa Timur dalam memproduksi tebu.

Begitu besar potensi yang dimiliki Indonesia khususnya Kabupaten Malang dalam pertanian tebu. Cukup besar pula pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi nasional dan daerah di Kabupaten Malang. Akan tetapi, ironis, hingga kini sektor ini masih belum mampu keluar dari rumitnya permasalahan yang menjeratnya, termasuk masalah pembiayaan dan hubungan kemitraan

yang dihadapi petani tebu. Bukan hal yang aneh jika program pemerintah yang ada, termasuk KKP-E dan program kemitraan lainnya masih menyimpan tanda tanya besar untuk mampu menyejahterakan petani.

Dari penjelasan di atas, peneliti ingin mencoba menganalisa implikasi kredit pertanian yang terdapat dalam program KKP-E terhadap kesejahteraan petani tebu di Kabupaten Malang, sehingga penulis mengambil judul: **“Implikasi Kredit Pertanian Terhadap Pendapatan Petani (Studi Kasus: Program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Pada Petani Tebu di Kabupaten Malang)”**.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah: (a) Bagaimana peran kemitraan pertanian tebu dalam menunjang tata niaga petani tebu untuk menyejahterakan petani tebu di Kabupaten Malang, dan (b) Bagaimana implikasi kredit pertanian dalam program KKPE terhadap pendapatan petani tebu di Kabupaten Malang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kemitraan pertanian tebu dalam menunjang tata niaga petani tebu untuk menyejahterakan petani tebu di Kabupaten Malang, dan mengetahui implikasi kredit pertanian dalam program KKP-E terhadap kesejahteraan petani tebu di Kabupaten Malang.

## **B. TINJAUAN TEORI**

### **Pertanian dan Perannya Bagi Perekonomian Nasional**

Ada beberapa definisi tentang sektor pertanian. Para ahli tersebut mendefinisikan pertanian berdasarkan sudut pandang mereka masing-masing. Menurut Mahayana (2011) pertanian memiliki arti luas dan sempit. Secara luas, pertanian diartikan sebagai pengolahan tanaman, ternak, dan ikan agar memberikan suatu produk. Sedangkan secara sempit pertanian diartikan sebagai pengelolaan tanaman dan lingkungannya agar memberikan suatu produk. Sedangkan yang dimaksud petani dalam hal ini adalah orang yang mengusahakan usaha pertanian (tanaman bahan makanan dan tanaman perkebunan rakyat) atas resiko sendiri dengan tujuan untuk dijual, baik sebagai petani pemilik maupun petani penggarap (sewa, kontrak, bagi hasil). Orang yang bekerja di sawah/ladang orang lain dengan mengharapkan upah (buruh tani) bukan termasuk petani.

Meskipun pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia, namun sudah menjadi berita lama jika sektor pertanian memiliki berbagai masalah kompleks yang hingga kini masih terus menjeratnya dari berbagai sisi, termasuk pada sisi ekonominya. Berikut ini Mubyarto (1977) menuliskan persoalan-persoalan dalam ekonomi pertanian, yaitu: (1) Jarak waktu yang lebar antara pengeluaran dan penerimaan pendapatan dalam pertanian, (2) Pembiayaan Pertanian, (3) Tekanan Penduduk Pertanian, (4) Pertanian Subsisten.

### **Peran Pemerintah dalam Mendukung Pertanian**

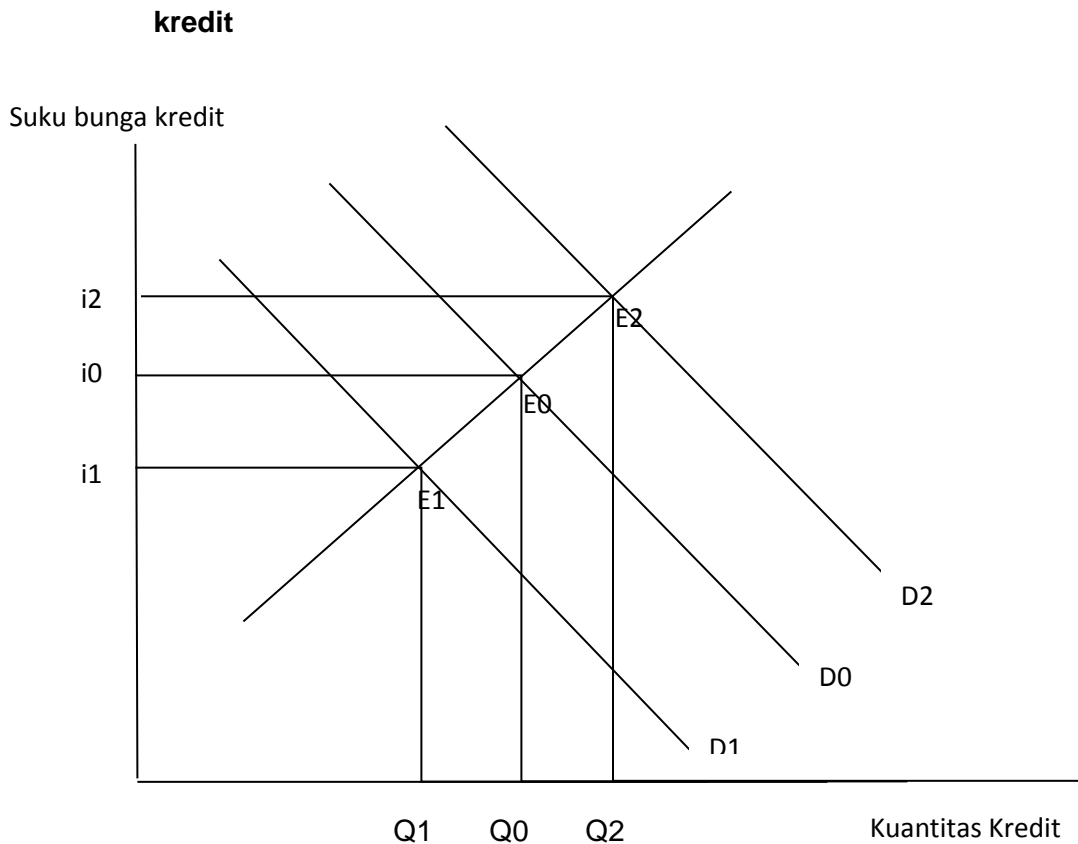
Peran pemerintah dalam mendukung sektor pertanian terwujud dalam beberapa program-program yang dibuat pemerintah untuk mendukung kemajuan dan perkembangan sektor pertanian. Berbagai program tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberian subsidi dan perbaikan infrastruktur. Mengenai kebijakan subsidi, subsidi pupuk petani merupakan salah satu kebijakan utama pembangunan pertanian yang telah lama dilaksanakan pemerintah dengan cakupan dan besaran yang berubah dari waktu ke waktu. Di Indonesia, subsidi pertanian berupa subsidi harga input usahatani, yaitu subsidi pupuk, benih dan bunga kredit. Selanjutnya untuk infrastruktur, Kementerian Pertanian telah melakukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur pertanian yang mencakup Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), Jaringan Irigasi Desa (JIDES), Tata Air Mikro (TAM), Jalan Usaha Tani (JUT), Jalan Produksi, konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS), embung, sawah, sumur, dam parit, dan konservasi lahan (Kementerian Pertanian, 2009).

## **Teori Permintaan Kredit**

Model *loanable funds* merupakan analogi dari kurva permintaan dan penawaran kredit. Kurva permintaan menunjukkan permintaan kredit oleh *borrowers*, sedangkan kurva penawaran menunjukkan penawaran kredit dari para *lenders* (Pasha, 2009).

Pada kurva pengaruh permintaan kredit terhadap suku bunga dan kuantitas kredit (gambar 1) dijelaskan bahwa semula keseimbangan antara kurva permintaan kredit (D0) dan kurva penawaran kredit (S) terjadi EO. Pada kondisi tersebut suku bunga pada  $i_0$ . Jika kurva permintaan kredit (D0) bergeser ke kiri, maka akan muncul keseimbangan baru pada E1. Pada kondisi tersebut, suku bunga telah menurun menjadi  $i_1$ . Selanjutnya, jika kurva permintaan bergeser ke kanan, maka keseimbangan akan terjadi pada titik E2. Pada kondisi tersebut, suku bunga telah meningkat menjadi  $i_2$ . Hal ini menjelaskan mengapa pergeseran kurva permintaan menyebabkan terjadinya perubahan suku bunga. Permintaan kredit sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kondisi perekonomian suatu negara dan faktor struktural mikroekonomi (Nugroho, 2010). Kondisi perekonomian misalnya resesi akan membuat permintaan kredit menurun. Dari sisi mikro, kondisi neraca perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan kredit (Nugroho, 2010).

Gambar 1 Pengaruh permintaan kredit terhadap suku bunga dan kuantitas kredit



Sumber: Nugroho (2010)

### Kontrak Pada Usahatani

Masalah yang kerap terjadi dalam kegiatan ekonomi adalah ketidaksetaraan antar pelaku ekonomi dalam wujud posisi daya tawar maupun informasi asimetris. Implikasinya, pada akhirnya dalam kegiatan ekonomi terdapat salah satu atau beberapa pihak yang memperoleh keuntungan di atas kerugian pihak lain. Kontrak secara umum menggambarkan kesepakatan satu pelaku untuk melakukan tindakan yang memiliki nilai ekonomi kepada pihak lain dengan konsekuensi adanya tindakan balasan atau pembayaran.

Definisi kontrak usahatani (*contract farming*) adalah sebuah sistem produksi dan penyediaan produk pertanian/hortikultura dibawah kontrak berjangka antara produser/penjual dan pembeli (Goel, 2003). Selain itu, Manzilati (2011) juga menuliskan bahwa terkait dengan kontrak tersebut, petani diharuskan untuk menanam tanaman pihak kontraktor di lahan mereka, dan kemudian memanen dan mengirimkan kepada pihak kontraktor sejumlah produksi yang didasarkan kepada hasil yang telah diperhitungkan dan ukuran yang ditetapkan. Dalam hal ini, kontrak biasanya juga menyediakan beberapa keuntungan bagi petani, antara lain terjaminnya pasar, akses terhadap layanan perusahaan dan kemudahan akses terhadap kredit. Bahkan dalam beberapa kasus perusahaan tidak menyediakan sendiri pinjaman kepada petani, bank-bank biasanya menerima kontrak sebagai jaminan (*Collateral*) (Glover and Ghee, 1992).



Pada sektor pertanian, petani telah menunjukkan motivasi yang kuat untuk menerima bantuan teknis dan input pertanian utama dari perusahaan agribisnis. Bagi petani, ketidakpastian pasar input lebih penting daripada ketidakpastian pasar output dalam keputusan petani untuk bermitra. Di pasar input, petani menganggap bahwa bermitra merupakan cara untuk mengurangi resiko dari permasalahan pasokan input dan ketidakpastian benih. Pada pasar input tersebut, petani kecil dibatasi oleh beberapa masalah, seperti tidak tersedianya (kualitas) input kurangnya informasi untuk mendapatkan, lalu bagaimana menggunakannya, serta kurangnya akses terhadap kredit untuk membeli input tersebut (Abebe, 2013)

### **Kesejahteraan Petani**

Kesejahteraan memiliki beragam pengertian karena lebih bersifat subjektif, yakni setiap orang dengan pedoman, tujuan, dan cara hidupnya yang berbeda-beda akan memberikan nilai-nilai yang berbeda pula tentang kesejahteraan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan (Sunarti, 2006). Mengingat kesejahteraan merupakan hal yang relatif, maka terdapat sedikitnya lima aspek yang menunjukkan indikator (penciri atau penanda) kesejahteraan petani (Sudana et al., 2008), yaitu: (1) Perkembangan struktur pendapatan, (2) Perkembangan pengeluaran untuk pangan, (3) Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP), (4) Perkembangan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga petani, (5) Daya beli rumah tangga petani.

Pendapatan usahatani merupakan suatu organisasi produk yakni petani sebagai usahawan mengorganisir alam (tanah), tenaga kerja, dan modal dengan tujuan untuk memperoleh hasil dan keuntungan sebesar-besarnya. Suatu usahatani dikatakan menguntungkan apabila dapat memberi hasil yang lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan. Sebaliknya, bila biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada nilai yang diperoleh maka usahatani tersebut dikatakan rugi (Mosher, 1991).

## **C. METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Untuk mendeskripsikan secara mendalam tentang implikasi kredit pertanian terhadap kesejahteraan petani, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena meneliti suatu fenomena secara mendalam dan fenomena tersebut sampai sekarang belum banyak diketahui. Sehingga dengan pendekatan kualitatif ini diharapkan temuan-temuan empiris dapat dideskripsikan lebih rinci, jelas, dan akurat.

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Lokasi studi kasus yang dipilih untuk penelitian ini adalah Kecamatan Bululawang, dan beberapa kecamatan lainnya di Kabupaten Malang. Beberapa lokasi ini dipilih karena daerah tersebut merupakan wilayah kerja PG Krebbe Baru. Lokasi utama yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kecamatan Bululawang di Kabupaten Malang yang merupakan wilayah historis PG Krebbe Baru. Selanjutnya beberapa kecamatan lainnya yang dipilih untuk mencari responden yang sesuai dengan kriteria penelitian yakni Kecamatan Wajak dan Kecamatan Gondanglegi.

### **Metode Penarikan Sampel**

Metode yang digunakan dalam penentuan sampel adalah *cluster sampling*. Petani tebu di wilayah kerja PG Krebbe Baru dikluster berdasarkan ikut atau tidaknya dalam program kemitraan PG Krebbe Baru. Jumlah dan data KUD Kecamatan Bululawang terkait petani non-mitra sangat terbatas, sehingga untuk mendapatkan responden petani tebu non-mitra ini digunakan *snowball method* dengan cakupan wilayah Kecamatan Bululawang dan dua kecamatan terdekat lainnya. *Snowballing* dilakukan

dengan bertanya kepada responden pertama mengenai petani terdekat yang dapat diwawancarai dengan kriteria tertentu seperti ikut tidaknya dalam mitra.

### **Metode Pengolahan dan Analisis Data**

Data yang akan diperoleh dalam penelitian ini berupa data kualitatif dan kuantitatif. Metode untuk mengolah data kualitatif menggunakan analisis deskriptif, sedangkan data kuantitatif akan dianalisis dengan statistika deskriptif (Sumarna, 2012). Selanjutnya, data yang diperoleh dari wawancara dengan petani ditransformasikan ke dalam bentuk tabel. Hal ini perlu dilakukan agar data yang diperoleh lebih mudah dibaca dan dipahami. Data yang telah mengalami transformasi digunakan sebagai masukan untuk analisis selanjutnya, yaitu analisis pendapatan usahatani tebu. Berikut ini merupakan analisa data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Persamaan untuk mencari *Mean* dengan menggunakan rumus:

$$Mean = \frac{\sum Xi}{n}$$

Dimana:

$X_i$  = Data ke- $i$

$N$  = Jumlah data

Sedangkan persentase ditentukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Pengamatan}}{\text{Jumlah Data}} \times 100\%$$

2. Pendapatan usahatani tebu dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\pi = TP - TB$$

Dimana:

$\pi$  = pendapatan (keuntungan)

$TP$  = total penerimaan

$TB$  = total biaya

3. Persamaan Imbangan penerimaan dan biaya (*R/C ratio*) usahatani tebu:

$$R/C = \frac{TR}{TC}$$

Dimana:

TR = *Total Revenue* (Total Penerimaan)

TC = *Total Cost* (Total Biaya)

#### **D. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Pada pembahasan hasil penelitian ini akan dibahas mengenai peran kemitraan pertanian tebu dalam menunjang tata niaga petani tebu untuk menyejahterakan petani tebu di Kabupaten Malang dan implikasi kredit pertanian dalam program KKPE terhadap pendapatan petani tebu di Kabupaten Malang. Penelitian ini melibatkan dua jenis petani yang menjadi responden, yakni petani tebu mitra dan non-mitra. Terkait hal itu, masing-masing dari petani tersebut memiliki karakteristik sosial ekonomi yang berbeda-beda. Berikut ini merupakan karakteristik dari masing-masing petani tebu mitra dan non-mitra berdasarkan hasil penelitian.

##### **Usia**

Komposisi usia responden terdiri dari 20% dewasa awal, 75% dewasa madya, dan 5% dewasa lanjut. Petani mitra responden terdiri dari dewasa awal 20%, dewasa madya 70%, dewasa lanjut 10%. Petani non mitra terdiri dari dewasa awal 20%, dewasa madya 80%, dewasa lanjut 0%.

##### **Pendidikan**

Rata-rata pendidikan petani mitra responden 10,5 tahun, sedangkan petani non-mitra responden 9,3 tahun. Mayoritas petani non-mitra memiliki pendidikan terakhir SMP dan SMA/Sederajat. Masing-masing 40% untuk tingkat SMP dan 40% untuk tingkat SMA/Sederajat pada petani non-mitra. Sedangkan pada petani mitra, mayoritas pendidikan formal responden hampir rata satu sama lainnya, yakni SMP, SMA/Sederajat, dan sarjana. Masing-masing 30% untuk tingkat SMP, 30% tingkat SMA/Sederajat, dan 30% Sarjana pada petani mitra tersebut.

##### **Luas Lahan**

Petani mitra responden menguasai rata-rata 1,9 ha dengan rentang nilai 0,5 hingga 5 ha. Rata-rata penguasaan lahan petani non mitra 1,1 ha dengan rentang nilai 0,5 ha hingga 2,5 ha. Penguasaan lahan tersebut diperoleh melalui kepemilikan lahan dan penyewaan. Kepemilikan lahan petani responden rata-rata 1,1 ha dengan rentang nilai 0,25 ha hingga 3,5 ha. Sehingga dapat dipastikan bahwa petani responden yang menguasai lahan lebih dari 3,5 ha pasti menyewa lahan.

##### **Jumlah Tanggungan Keluarga**

Jumlah tanggungan keluarga responden petani berkisar antara dua hingga delapan orang. Proporsi terbesar yaitu memiliki tanggungan empat orang sebesar 40% kemudian lima orang sebesar 20%. Mayoritas petani tebu non-mitra, yakni sebesar 50% dari mereka menanggung empat orang. Kemudian untuk petani tebu mitra mayoritas memiliki persentase jumlah tanggungan keluarga yang hampir rata, yakni 30% menanggung empat orang, dan 30% menanggung lima orang.

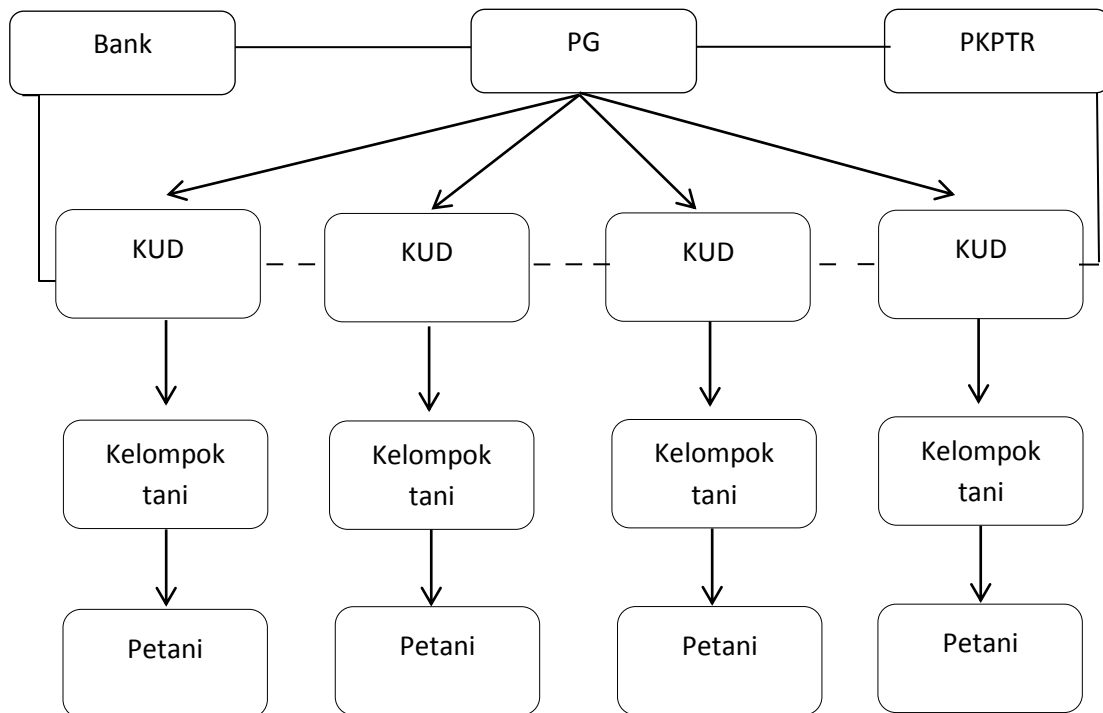
##### **Kemitraan**

Kelembagaan petani tebu di wilayah penelitian yaitu KUD (Koperasi Unit Desa), kelompok tani, PKPTR (Pusat Koperasi Primer Tebu Rakyat), Pabrik Gula (PG) Krebbe Baru. KUD memiliki peran penting dalam hubungan kemitraan antara PG dengan petani. Dalam hal ini, KUD berperan

sebagai perwakilan dari seluruh petani-petani yang bermitra dengan PG. Untuk bermitra dengan PG Kreet Baru, seluruh petani mitra harus bergabung dengan kelompok tani dan diperantarai oleh KUD yang ada di wilayah masing-masing. KUD merupakan lembaga yang secara langsung mewakili para petani yang tergabung dalam kelompok tani di wilayahnya untuk bermitra dengan PG Kreet Baru.

Berikut ini merupakan gambar struktur hubungan dalam kemitraan petani wilayah kerja PG Kreet baru dengan PG Kreet Baru

Gambar 2 Struktur Hubungan Kemitraan Petani Tebu



Sumber: Data lapang (diolah) 2013

Seluruh petani responden yang bermitra dengan PG Kreet Baru tergabung dalam kelompok-kelompok tani agar memudahkan manajemen dalam kegiatan kemitraan. Kelompok tani menjadi wadah bagi responden petani mitra untuk bersosialisasi dan saling bertukar informasi antar anggota tentang kegiatan kemitraan. Seluruh responden petani mitra bergabung dalam kelompok tani. Akan tetapi kondisi tersebut berbanding terbalik dengan petani non-mitra. Petani non mitra yang bergabung dengan kelompok tani sebesar 0%. Hal itu menunjukkan bahwa seluruh responden petani non-mitra tidak ada yang bergabung dalam kelompok tani.

Selanjutnya yakni PKPTR (Pusat Koperasi Primer Tebu Rakyat) merupakan koperasi induk dari seluruh KUD yang ada di wilayah kecamatan yang bekerjasama dengan PG Kreet Baru. Salah satu Staf Akuntansi PG Kreet Baru menjelaskan bahwa setiap PG mempunyai satu PKPTR. PKPTR tersebut membawahi 33 koperasi yang ada di wilayah kreet. Tugas PKPTR sendiri dalam hal ini ada tiga, yakni menangani masalah gula (lelang gula), penjualan tetes, dan menangani penyediaan pupuk.

PG Kreet Baru memiliki program kemitraan dengan para petani yang menjadi wilayah kerja pasokan tebu PG Kreet Baru. Namun, tak semua petani di wilayah kerja tersebut menjadi anggota mitra PG Kreet Baru. Dari hasil penelitian yang dilakukan melalui kuesioner, 60% petani non-mitra menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui bahwa ada program kemitraan dengan PG Kreet Baru. Petani tebu yang merasa tidak mengetahui adanya program kemitraan dengan PG tersebut adalah petani di Kecamatan Wajak. Kemudian, 40% petani non-mitra lainnya menyatakan bahwa mereka sebenarnya telah mengetahui bahwa ada program kemitraan dengan PG Kreet Baru.

Bukan merupakan hal sulit bagi petani untuk ikut bermitra dengan PG. Petani hanya perlu bergabung dengan kelompok dan mendaftarkan lahan tebu yang dikelolanya. Dalam hal ini PG tidak membatasi luas minimal lahan yang dikelola oleh petani tebu yang ingin bermitra dengan PG. Pada awal musim tanam, petani yang ingin menjadi mitra meminta izin ke PG Kreet Baru untuk memperoleh nomor register dan SPTA (Surat Perintah Tebang Angkut) sebagai bukti bahwa petani tersebut telah terdaftar untuk bermitra dengan PG Kreet Baru. Setelah kedua belah pihak yang diperantarai oleh KUD tersebut telah bekerjasama, maka petani akan menggunakan SPTA untuk dapat menggilingkan tebunya ke PG. Selanjutnya PG membantu petani dengan paket kredit berupa uang tunai dan sarana produksi melalui register yang dimiliki masing-masing petani.

### **Kredit dalam Kemitraan**

Pada kontrak antara PG Kreet baru dan petani tebu mitra ini, PG menyediakan fasilitas permodalan usahatani tebu melalui program kredit yang juga merupakan program dari pemerintah. Kredit yang disediakan adalah Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE). Dalam pengajuan kredit, PG Kreet Baru berperan sebagai avalis yaitu penanggung jawab resiko kegagalan pengambilan kredit. Keberadaan fasilitas kredit yang disediakan bagi petani tebu mitra tersebut memudahkan petani dalam mendapatkan modal untuk usahatannya. Hal itu senada dengan hasil *survey* penelitian terhadap petani tebu mitra. Seluruh petani tebu mitra merasa bahwa persyaratan untuk mengajukan kredit usahatani menjadi lebih mudah setelah ada kemitraan dengan PG Kreet Baru.

Mengingat program KKPE tebu hanya untuk yang bermitra saja, maka tak heran jika 80% petani tebu non-mitra tidak mengetahui adanya program KKPE, dan hanya 20% yang mengetahui ada program KKPE untuk usahatani. Bagi mereka yang mengetahui, informasi tersebut mereka peroleh dari kerabat maupun koperasi di wilayahnya. Meminjam kredit pada bank untuk usaha pertanian tebu bagi petani tebu non-mitra ini masih menjadi hal yang sulit bagi petani. Bunga yang tinggi dan syarat administrasi yang rumit masih menjadi kendala bagi petani dalam meminjam modal untuk usahatannya.

Bunga kredit pada program KKP-E sebesar 10,5%, dengan subsidi bunga dari pemerintah 4,5% per tahun, dan sisanya sebesar 6% per tahun ditanggung oleh debitur. Akan tetapi, bunga KKPE yang dibebankan kepada petani tebu pada kenyataannya berubah menjadi 16 hingga 18% per tahun. Besarnya bunga yang dibebankan kepada petani tersebut merupakan keputusan dari KUD dan selisih bunga tersebut menjadi keuntungan bagi KUD.

### **Pendapatan Petani Tebu**

Pada sektor pertanian, setidaknya terdapat tiga bentuk kontrak yang salah satunya adalah kontrak bagi hasil (*share contract*) seperti yang ada dalam hubungan kontrak antara PG Kreet Baru dengan petani tebu mitranya. Keputusan persentase bagi hasil tersebut diperoleh dari hasil musyawarah dalam FTK (Forum Temu Kemitraan). FTK dihadiri oleh beberapa pihak saja, yakni pengurus PG Kreet Baru, pengurus PKPTR, serta pengurus KUD yang mewakili petani mitra.

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam FTK tersebut, saat ini persentase bagi hasil antara PG Kreet Baru dengan petani mitra sebesar 34%:66%. Artinya, dari keseluruhan hasil yang diperoleh setelah tebu diproduksi menjadi gula, maka 34% hasil tersebut milik PG Kreet Baru, dan 66% sisanya milik petani mitra. 66% hasil produksi yang diberikan kepada petani tersebut tidak seluruhnya

diberikan dalam bentuk uang, melainkan 90% berupa uang tunai hasil lelang gula yang dilakukan oleh PKPTR, dan sisanya 10% diberikan dalam bentuk gula.

Pada usahatani tebu tidak ada hasil panen yang dikonsumsi sendiri, Karena itu dalam penelitian ini semua penerimaan adalah penerimaan tunai. Petani yang menggilingkan tebu di PG mendapat penerimaan dari hasil lelang gula dan bagian tetes tebu. Meskipun seharusnya petani tebu mitra menjual seluruh hasil produksi tebunya ke PG, namun tak sedikit petani yang hanya menjual sebagian kecil hasil produksinya ke PG sebagai kewajiban untuk menutup hutang petani mitra ke PG. selanjutnya, sisa hasil produksi yang tidak dijual ke PG mereka jual ke pedagang yang bersedia membeli produksi tebunya dengan harga yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil penelitian melalui kuesioner yang dibagikan pada petani tebu mitra, menunjukkan bahwa 50% petani tebu mitra menyatakan menjual seluruh hasil produksinya ke PG, dan 50% lainnya menyatakan tidak menjual seluruh hasil produksi tebu mereka ke PG.

Tak hanya itu, dari data yang diperoleh melalui kuesioner, ternyata tidak semua petani mitra merasa untung dengan menjual hasil tebunya tersebut ke perusahaan mitra (PG). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 40% petani mitra merasa tidak memiliki keuntungan lebih dengan menjual hasil tebunya ke perusahaan mitra (PG) dibanding dengan ia menjual hasil tebunya tersebut ke pihak lain (tengkulak/pedagang). Selanjutnya, 60% lainnya dari petani mitra menyatakan bahwa mereka merasa lebih memiliki keuntungan dengan menjual hasil tebunya ke perusahaan mitra (PG) dibanding dengan ia menjual tebunya ke pihak lain (tengkulak/pedagang).

Bagi petani non mitra, mereka akan menjual seluruh hasil produksinya ke pedagang karena tidak bermitra dengan PG. Seluruh petani tebu yang menjual hasil tebu mereka secara langsung kepada pedagang akan memperoleh penerimaan dari pembayaran atas tebu yang dijual tersebut. Penerimaan rata-rata responden petani mitra Rp. 40.549.999. Sedangkan penerimaan rata-rata responden petani non mitra Rp 64.215.237 per hektar.

Pada penelitian ini pendapatan responden petani mitra dibandingkan dengan non-mitra. Agar dapat dibandingkan, maka total biaya (biaya tetap dan biaya variabel), penerimaan, dan pendapatan dirata-rata per hektar. Dari data penerimaan dan biaya bisa dilihat rasio penerimaannya atas biaya atau rasio R/C. Rasio penerimaan atas biaya menunjukkan berapa besarnya penerimaan yang akan diperoleh dari setiap biaya yang dikeluarkan dalam produksi usahatani. Melalui analisis ini, maka akan diketahui untung atau tidaknya usahatani.

Berikut ini merupakan tabel imbalan penerimaan dan biaya (*R/C ratio*) pada usahatani tebu petani tebu mitra dan non-mitra responden:

**Tabel 1 Imbalan Penerimaan dengan Biaya (*R/C ratio*) Usahatani Tebu**

Jenis Petani Tebu	Penerimaan (Rp/ha)	Biaya (Rp/ha)	R/C ratio
Mitra	Rp 40.549.999	Rp 18.610.160	2,18
Non-Mitra	Rp 64.215.237	Rp 19.820.539	3,24

Sumber: Data lapang (diolah) 2013

Pada Tabel di atas telah ditunjukkan bahwa R/C baik petani mitra maupun non mitra bernilai lebih dari 1, sehingga keduanya layak diusahakan. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa hasil R/C *ratio* pada petani tebu non-mitra lebih besar dari petani tebu mitra. Artinya, setiap rupiah biaya yang dikeluarkan oleh Petani tebu responden non-mitra sebesar 50% hanya dikenakan potongan biaya tebang oleh pedagang, sedangkan 50% lainnya memilih membayar tenaga kerja untuk melakukan tebang angkut sendiri oleh petani non-mitra akan memberikan penerimaan sebesar nilai R/C yang ternyata nilai penerimaan petani non-mitra tersebut lebih besar daripada penerimaan yang diperoleh petani mitra.

Pada tabel tersebut juga terlihat bahwa R/C petani non-mitra lebih tinggi karena penerimaan lebih tinggi meskipun biaya petani non-mitra juga lebih besar dari petani mitra. Biaya petani non-mitra lebih tinggi karena potongan-potongan pinjaman dan bunga yang harus dibayar petani belum disertakan dalam pembiayaan. Potongan-potongan tersebut telah termasuk dalam penerimaan petani yang didapat setelah dipotong pinjaman dan bunga oleh KUD. Kondisi realita semacam itu berbanding terbalik dengan teori standar (neoklasik). Seperti yang ditulis oleh Yustika (2010) bahwa teori standar (neoklasik) mengasumsikan kontrak dalam kondisi lengkap (*complete contract*) yang dapat dibuat dan ditegakkan tanpa biaya (*costlessly*), akan tetapi dalam realitanya untuk membuat dan menegakkan kontrak yang sempurna sangat sulit karena terdapat biaya transaksi di dalamnya.

Tingginya penerimaan petani non-mitra itu karena 90% petani non-mitra tidak dikenakan potongan-potongan pinjaman dan bunga kredit. Petani non mitra responden yang mengakses kredit secara mandiri ke bank hanya 10%. Tak hanya itu, tingginya penerimaan petani non-mitra juga karena petani tersebut lebih memiliki kebebasan menjual hasil tebunya secara bebas kepada pedagang yang bersedia membelinya dengan harga yang tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di tiga tempat wilayah kerja PG Kreet Baru, yakni Kecamatan Bululawang, Kecamatan Wajak, dan Kecamatan Gondanglegi tersebut menunjukkan bahwa seluruh petani tebu mitra responden merupakan petani di Kecamatan Bululawang, karena mayoritas petani di daerah tersebut adalah petani tebu mitra. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun 80% petani tebu mitra tidak merasakan adanya peningkatan pendapatan maupun produktivitas dengan program kemitraan ini, namun mayoritas petani di daerah ini tetap memilih untuk bermitra. Selain faktor ekonomi, ternyata faktor non-ekonomi merupakan faktor lain yang menjadi perekat bagi petani tebu untuk tetap memilih bermitra dengan PG kreet baru. Faktor non-ekonomi tersebut berupa pengaruh kondisi lingkungan sekitar mereka yang mayoritas merupakan petani tebu mitra.

Terkait program KKPE ini, seluruh petani responden menyatakan bahwa kredit dalam program KKPE yang diberikan kepada petani tebu ini masih tidak cukup untuk menjalankan usahatani. Mereka merasa bahwa mereka masih harus banyak menambah biaya sendiri untuk membeli pupuk tambahan dan biaya garap lainnya. Bahkan beberapa dari mereka ada yang juga menambah pinjaman ke koperasi melalui kredit KSP (Koperasi Simpan Pinjam).

Meskipun secara teori ekonomi modal menunjang usahatani, namun KKPE dalam hal ini belum banyak memberikan pengaruh yang signifikan bagi pendapatan dan produktivitas petani tebu. Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan pada petani tebu mitra, sebanyak 70% responden petani tebu mitra menyatakan bahwa masing-masing dari mereka tidak merasa ada peningkatan pendapatan dan produktivitas setelah memperoleh program kredit KKPE. Mereka merasa bahwa peningkatan pendapatan lebih tergantung pada harga pasar gula dan produktivitas lebih tergantung pada perawatan maupun pengelolaan tanaman. Sedangkan 30% lainnya merasakan peningkatan pendapatan dan produktivitas setelah memperoleh kredit dalam program KKPE ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, program KKPE masih memiliki berbagai permasalahan dalam implementasinya. Adanya informasi yang masih belum sempurna pada petani tebu terkait KKPE ini menyebabkan petani tebu menjadi pihak yang dirugikan karena harus

menanggung peningkatan bunga dari program kredit tersebut. Seharusnya melalui program kredit ini petani memperoleh subsidi bunga 6,5% dari pemerintah, namun pada kenyataannya petani harus membayar bunga 16-18% per tahun. Akibatnya, pendapatan petani mitra berkurang cukup besar dibanding pendapatan petani tebu non-mitra yang mayoritas memilih tidak mengambil kredit (modal sendiri).

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dideskripsikan dalam pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Kemitraan belum memberikan peran yang signifikan dalam menunjang tata niaga petani tebu. Sehingga kemitraan tersebut juga belum dapat memberikan kesejahteraan bagi petani tebu di Kabupaten Malang. Hasil analisis usahatani menunjukkan bahwa keuntungan yang didapat petani non-mitra lebih tinggi daripada petani mitra. Hal itu ditunjukkan oleh hasil *R/C ratio* petani non-mitra lebih tinggi daripada petani mitra. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemitraan belum dapat menunjang tata niaga petani tebu dalam meningkatkan pendapatan usahatannya.
2. Kredit pertanian dalam program KKPE belum memberikan implikasi yang signifikan terhadap pendapatan petani tebu di Kabupaten Malang. Hal itu ditunjukkan oleh hasil kuesioner yang disebarkan pada petani tebu mitra. Selain itu, adanya peningkatan bunga dalam KKPE dan prosedur dalam kemitraan yang panjang membuat petani yang mengambil program kredit KKPE ini memiliki pendapatan yang lebih rendah daripada petani tebu non-mitra yang tidak mengikuti program KKPE.

### Saran

Berdasarkan penjelasan dari seluruh hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka disarankan untuk:

1. Petani tebu mitra lebih aktif dalam berdiskusi dan berdialog dengan perusahaan mitra maupun KUD.
2. PG perlu meningkatkan kedekatan secara kultural maupun struktural kepada petani mitra melalui kegiatan penyuluhan dan pendampingan petani untuk meningkatkan kemampuan manajemen usahatani dan produktivitas pertanian
3. PG perlu mengadakan sistem *rolling* tebang tebu agar penerimaan petani tebu mitra lebih merata di segala waktu. Tidak hanya petani tebu mitra yang memiliki kedekatan khusus dengan pihak-pihak terkait saja yang memperoleh jatah tebang pada saat rendemen optimum dan harga gula tinggi.
4. PG perlu mengawasi dan mengatur biaya transaksi (potongan biaya dan bunga) yang dibebankan ke petani tebu mitra.
5. PG perlu mengadakan dialog/pertemuan rutin untuk menjalin komunikasi dengan petani tebu dan mengadakan evaluasi kemajuan yang dirasakan oleh kelompok tani setelah panen



